DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

RENCANA KERJA

TAHUN 2027









BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 36 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027, perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;
c. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 41 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2027, program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan rencana kerja pemerintah daerah provinsi.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang selanjutnya disebut Renja PD Tahun 2027 adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup pemerintahan Daerah.
10. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Renja PD Tahun 2027 dimaksudkan untuk menjabarkan Program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2027 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD.

Pasal 3

Renja PD Tahun 2027 disusun bertujuan untuk :

a. pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
b. acuan dalam penyusunan rencana anggaran PD tahun 2027.

Pasal 4

(1) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2027 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2027 dan rencana strategis PD.
(2) Renja PD tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1) Renja PD Tahun 2027 disusun dengan sistematika:
    a. bab I memuat pendahuluan;
    b. bab II memuat hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
    c. bab III memuat tujuan dan sasaran PD;
    d. bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan PD;
    e. bab V memuat kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
    f. bab VI memuat penutup.
(2) Renja PD Tahun 2027 terdiri dari:
    a. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
    b. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    c. Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
    d. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
    e. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis;
    f. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
    g. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    h. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
    i. Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
    j. Rencana Kerja Dinas Sosial;
    k. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    l. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
    m. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
    n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
    o. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
    p. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
    q. Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
    r. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;
    s. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
    t. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    u. Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
    v. Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
    w. Rencana Kerja Dinas Perikanan;
    x. Rencana Kerja Dinas Pangan;
    y. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
    z. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

aa. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
bb. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
cc. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
dd. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
ee. Rencana Kerja Kecamatan Gunuang Omeh;
ff. Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan;
gg. Rencana Kerja Kecamatan Suliki;
hh. Rencana Kerja Kecamatan Guguak;
ii. Rencana Kerja Kecamatan Mungka;
jj. Rencana Kerja Kecamatan Akabiluru;
kk. Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh;
ll. Rencana Kerja Kecamaan Luak;
mm. Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban;
nn. Rencana Kerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari;
oo. Rencana Kerja Kecamatan Harau;
pp. Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru; dan
qq. Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX.

(3) Rencana Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(4) Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(5) Rencana Kerja Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(6) Rencana Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(7) Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(8) Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(9) Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(10) Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(11) Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(12) Rencana Kera Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(13) Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(14) Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(15) Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(16) Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(17) Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(18) Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(19) Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(20) Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(21) Rencana Kerja Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(22) Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(23) Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(24) Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(25) Rencana Kerja Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(26) Rencana Kerja Dinas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(27) Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(28) Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf z

tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(29) Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(30) Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ab tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(31) Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ac tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(32) Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ad tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(33) Rencana Kerja Kecamatan Gunuang Omeh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ae tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(34) Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf af tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(35) Rencana Kerja Kecamatan Suliki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ag tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(36) Rencana Kerja Kecamatan Guguak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ah tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(37) Rencana Kerja Kecamatan Mungka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ai tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(38) Rencana Kerja Kecamatan Akabiluru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aj tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(39) Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ak tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(40) Rencana Kerja Kecamatan Luak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf al tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(41) Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf am tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(42) Rencana Kerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf an tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(43) Rencana Kerja Kecamatan Harau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ao tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(44) Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ap tercantum dalam Lampiran XLII

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(45) Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aq tercantum dalam Lampiran XLIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2027 dilakukan oleh masing-masing kepala PD.

Pasal 7

(1) Perubahan Renja PD Tahun 2027 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

(2) Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2027 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 30 September 2026

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFNI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 30 September 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

HERMAN AZMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2026 NOMOR 36

KATA PENGANTAR

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Oleh karena itu perencanaan pembangunan perlu dilakukan dalam kerangka visi, misi, arah kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan dalam upaya mewujudkan kesejahteran masyarakat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk Tahun 2027.

Terakhir, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota. Mudah-mudah bermanfaat dan diredhai oleh Allah SWT.

Payakumbuh, Juli 2026

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Drh. DEVI KUSMIRA
NIP. 19751216 200212 2 003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI			i
DAFTAR TABEL			ii
BAB I	:	**PENDAHULUAN**	1
		1.1 Latar Belakang	1
		1.2 Landasan Hukum	7
		1.3 Maksud dan Tujuan	8
		1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II	:	**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**	12
		2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	12
		2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
		2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	22
		2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	37
		2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	50
BAB III	:	**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**	51
		3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	51
		3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	52
		3.3 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	55
BAB IV	:	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**	85
BAB V	:	**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**	102
BAB VI	:	**PENUTUP**	104

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 1.1 Kalender Penyusunan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2027	.....	2
2.	Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	.....	15
3.	Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	.....	20
4.	Tabel 2.3 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewab	.....	21
5.	Tabel 2.4 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	.....	23
6.	Tabel 2.5 Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Berdasarkan Sasaran RPJMD	.....	27
7.	Tabel 2.6 Program dan Kegiatan sesuai Misi RPJMD	.....	30
8.	Tabel 2.7 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026 Kabupaten Lima Puluh Kota	.....	39
9.	Tabel 2.8 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2027 Kabupaten Lima Puluh Kota	.....	50
10.	Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota	.....	53
11.	Tabel 3.2 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2027 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota	.....	56
12.	Tabel 3.3 Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritasn Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota	.....	60
13.	Tabel 3.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pendukung Prioritas Kabupaten	.....	61
14.	Tabel 3.5 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Perkiraan Maju Tahun 2028	.....	67
15.	Tabel 4.1 Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota	.....	85

16. Tabel 4.2 Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota) 86

17. Tabel 4.3 Rencana Kinerja Iku Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 101

18. Tabel 5.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota 102

19. Tabel 5.2 Indikator Kinerja Kunci 102

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan Dokumen perencanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 mengacu kepada kebutuhan dan permasalahan pembangunan peternakan di Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan potensi sumber daya yang tersedia, dalam rangka mengakomodir pencapaian target dan sasaran yang tercantum di dalam RKPD, serta dengan menjaga kesinambungan pembangunan sebagaimana yang diarahkan di dalam Renstra. Oleh karenanya, diperlukan suatu Rencana Kerja (Renja) agar tujuan pembangunan peternakan seperti yang disebutkan di atas dapat tercapai.

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Renja PD yaitu dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam melakukan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan. Berpedoman pada pasal 128 Permendagri 86 Tahun 2017, tahapan penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai berikut:

I. Persiapan Penyusunan;
II. Penyusunan Rancangan Awal;
III. Penyusunan Rancangan;
IV. Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD;
V. Perumusan Rancangan Akhir;
VI. Penetapan Renja PD.

Berikut adalah Tabel Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 :

Tabel 1.1
Kalender Penyusunan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2027

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2025								2026																													
		Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A	Persiapan Penyusunan Renja 2027																																						
1	Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja																																						
2	Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja																																						
3	Orientasi Mengenai Renja Perangkat Daerah																																						
4	Penyiapan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan SIPD																																						
B	Penyusunan Rancangan Awal Renja 2027																																						
1	Penyusunan Rancangan Awal Renja 2027 berdasarkan Ranwal RKPD dan																																						

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2025								2026																													
		Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Renstra OPD																																								
2	Penyampaian Rancangan Awal Renja PD kepada Perangkat Daerah untuk Diverifikasi																																								
3	Verifikasi Ranwal Renja PD oleh Perangkat Daerah untuk Menjamin bahwa Rancangan Awal Renja PD Sudah Selaras dengan Rancangan Awal RKPD dan Renstra OPD																																								
C	Penyusunan Rancangan Renja 2027																																								
1	Penyusunan Rancangan Renja PD sesuai Ranwal RKPD dan usulan pokir serta hasil Musrenbang																																								
2	Penyampaian Rancangan Renja PD kepada Perangkat Daerah untuk Diverifikasi sebagai Bahan Penyempurnaan Ranwal RKPD menjadi Rancangan RKPD																																								

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2025								2026																											
		Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
3	Verifikasi Renja PD oleh Perangkat Daerah untuk Menjamin bahwa Rancangan Renja PD Sudah Selaras dengan Rancangan Awal RKPD																																								
D	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas PD																																								
1	Pelaksanaan Forum PD Perangkat Daerah yang Dihadiri oleh Pemangku Kepentingan yang Memiliki Keterkaitan dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Bertujuan untuk Memperoleh Masukan dalam Rangka Penajaman Target Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan, Lokasi dan Kelompok Sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah																																								
E	Perumusan Rancangan Akhir Renja 2027																																								

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2025								2026																															
		Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyempurnaan Rancangan Renja menjadi Rancangan Akhir Renja Berdasarkan Perkada tentang RKPD dengan Mempertajam Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif PD Berdasarkan Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif yang Ditetapkan di dalam Perkada RKPD																																								
2	Penyampaian Rancangan Akhir Renja PD kepada Perangkat Daerah untuk Diverifikasi																																								
3	Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD oleh Perangkat Daerah untuk Menjamin bahwa Rancangan Akhir Renja PD Sudah Selaras dengan Perbup RKPD																																								
F	Penetapan Renja PD 2027																																								
1	Penyampaian Rancangan Akhir Renja Semua PD oleh Perangkat Daerah																																								

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2025								2026																													
		Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk Selanjutnya Ditetapkan dengan Perkada																																						
2	Penetapan Draft Perkada Renja menjadi Perkada Renja PD Se-Kabupaten Lima Puluh Kota yang difasilitasi Perangkat Daerah																																						

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah; (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1114) ;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petujuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Peggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);
13. Peratuan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 nomor 67);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 41 Tahun 2025 tentang Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2026 Nomor 21)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah:

1) Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.
2) Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota.
3) Menjabarkan visi, misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta tujuan, sasaran, target kinerja program dan kegiatan yang tertuang didalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ini ditujukan untuk :

1. Memberi arah dan mendorong seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan agar memiliki semangat dan kinerja dalam menetapkan dan melaksanakan program dan kegiatan selama satu tahun.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatannya sesuai dengan kewenangan dan tupoksi serta dalam pengawasan dan evaluasi.

3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2027.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota serta susunan garis besar isi.

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun berjalan tahun 2026, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap

IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Sub bab ini berisi uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan danFormulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalamperumusan program prioritas tahun rencana.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sub-bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Sub bab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi : Jumlah program dan jumlah kegiatan. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

(apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota

BAB VI. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
c. Rencana Tindaklanjut

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Memperhatikan tabel 2.1 yakni tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
   Berdasarkan target renja tahun 2025 dan hasil/keluarannya dapat terlaksana secara keseluruhan. Pada tahun 2025 realisasi keuangan sebesar 95,17% dan realisasi fisik 99,98%, dengan uraian sebagai berikut :
   - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan sebesar 95,16% dan realisasi fisik sebesar 99,98%.
   - Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan realisasi keuangan sebesar 97,51% dan realisasi fisik sebesar 100%.
   - Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan realisasi keuangan sebesar 78,24% dan realisasi fisik sebesar 100%.
   - Program Perizinan Usaha Pertanian dengan realisasi keuangan sebesar 100% dan realisasi fisik sebesar 100%.
   - Program Penyuluhan Pertanian dengan realisasi keuangan sebesar 100% dan realisasi fisik sebesar 100%.

   Secara umum dapat dilihat bahwa realisasi program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran. Adapun realisasi keuangan sebesar 95,17%.

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang di rencanakan.
   Untuk realisasi fisik sebesar 99,98%. Program yang telah memenuhi target sebagai berikut :
   1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
   3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
   4. Program Perizinan Usaha Pertanian
   5. Program Penyuluhan Pertanian

c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
   Hasil/keluaran yang direncanakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tidak ada yang melebihi target yang ditetapkan.

d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
   Secara keseluruhan, pencapaian kinerja di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota tidak ada kendala dan permasalahan yang berarti, hal ini dibuktikan dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan yang ditargetkan. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terpenuhinya target kinerja program/kegiatan antara lain sebagai berikut :
   - Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga sebagian besar realisasi program/kegiatan dapat dicapai sesuai harapan.
   - Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program kegiatan yang terarah serta relevansi antar program dan pagu anggaran yang tersedia.
   - Adanya sumber daya aparatur, saran dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung dari APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026 yang selaras dengan pencapaian target masing-masing kegiatan.

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, implikasi yang timbul adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat apabila target telah tercapai dan terganggunya pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat apabila target belum tercapai. Namun tidak semua indikator yang tercapai secara langsung berdampak pada tingkat pelayanan kepada masyarakat.

f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain sebagai berikut :

   - Komitmen bersama mulai dari Kepala Dinas, Kepala Bidang, Sub Koordinator, Pemegang program sampai dengan staf.
   - Terjalinnya kerja sama yang baik antara lintas program dan lintas sektor
   - Perlunya pembinaan secara kontiniu kepada pemegang program yang ada di Kabupaten sampai ke tingkat unit.
   - Pertemuan monitoring dan evaluasi pelayanan secara rutin terhadap kemajuan, hambatan dan permasalahan dalam melaksanakan pelayanan di lapangan.
   - Berusaha membuat teroboson/inovasi terhadap pelaksanaan pelayanan.

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Pencapaian Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sampai dengan capaian kinerja s.d tahun 2025 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Pencapaian Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan s.d tahun 2026 (n-1).

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Nama Perangkat Daerah : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2027	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2024	TARGET DAN REALISIASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2026	
									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN 2026	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	27	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	27	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	27	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%
3	27	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%
3	27	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	27	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	27	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	27	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2027	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2024	TARGET DAN REALISIASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2026	
									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN 2026	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan	7%	7%	7%	7%	100%	7%	14%	14%
3	27	2	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	7%	7%	7%	0%	0%	0%	0%	0%
3	27	2	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dalam Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	7%	7%	7%	7%	7%	7%	14%	14%
3	27	2	2.04		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengencer	Terlaksananya pengawasan peredaran obat hewan	7%	7%	7%	0%	0%	0%	0%	0%
3	27	2	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya penggunaan saranapeternakan	7%	7%	7%	0%	0%	0%	0%	0%
3	27	2	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Adanya hibah Kelompok	7%	7%	7%	0%	0%	0%	0%	0%
3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Penyediaan Prasarana dan Pengawasan Perizinan	2%	2%	2%	0%	0%	2%	4%	4%
3	27	3	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Pembangunan Prasana Pertanian	*2%*	*2%*	*2%*	0%	0%	*2%*	4%	4%
3	27	3	2.04		Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum	Penetapan Lahan Pengembalaan Umum yang bisa dikembangkan	*2%*	*2%*	*2%*	0%	0%	*2%*	4%	4%
3	27	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2%	2%	2%	2%	2%	2%	4%	4%
3	27	4	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah wabah penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	2%	2%	2%	2%	2%	2%	4%	4%

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2027	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2024	TARGET DAN REALISIASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2026	
									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN 2026	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
3	27	4	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2%	2%	2%	0%	0%	0%	2%	2%
3	27	4	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	2%	2%	2%	0%	0%	0%	0%	0%
3	27	4	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	*2%*	*2%*	2%	2%	2%	2%	4%	4%
3	27	6			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Peningkatan, Penyediaan Prasarana Pertanian dan Pengawasan Perizinan	2%	2%	2%	2%	2%	4%	4%	4%
3	27	6	2.02		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumahy Potong Hewan Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitasi Pemeliharaan Hewan	*2%*	*2%*	*2%*	*2%*	*2%*	*2%*	4%	4%
3	27	6	2,03		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Perizinan dan Pengembangan Usaha Pola Kemitraan/Kerjasama Terlaksanya Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	*2%*	*2%*	*2%*	0%	0%	*0%*	2%	2%

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2027	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2024	TARGET DAN REALISIASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2026	
									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN 2026	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan Pembinaan Kelembagaan Petani dan Kinerja Penyuluh Pertanian	2%	2%	2%	2%	100%	4%	4%	4%
3	27	7	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	*2%*	*2%*	*2%*	*2%*	100%	*2%*	4%	4%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima puluh nomor 65 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkududukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Penetapan Tolok Ukur dan indikator Kinerja tersebut terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang bersangkutan. Selanjutnya hasil analisisnya disajikan dengan tabel 2.2 yang berisikan Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Target Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 terus meningkat setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel 2.3

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO.	INDIKATOR	SPM/Standar Nasional	IKK KD dalam RPJMD	Target Renstra Perangkat Daerah / RPJMD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (thn n-2) 2025	Tahu (thn n-1) 2026	Tahun (thn n) 2027	Tahun (thn n +1) 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
1	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB		✓	32,52	33,24	33,96	34,68	32,08	0	33,96	34,68	Proyeksi Realisasi Capaian pada Tahun 2027 dan 2028 diharapkan Tercapai Sesuai Target

Tabel 2.3
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	31,45	32,52	33,24	33,96	34,68	35,4	36,12	
2	Nilai SAKIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	%	76,18	76,48	76,96	77,09	77,39	77,70	78,00	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ada 2 program untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dimana sesuai dengan target renstra perangkat daerah. Sampai dengan tahun 2025 target Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan telah dapat terealisasi sebesar 32,52% jika dihitung secara akumulatif dan untuk proyeksi tahun 2026 target capaian berada pada angka 33,24%, Untuk Nilai SAKIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025 telah terealisasi sebesar 75,14 %.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan OPD

Kebijakan dan strategi dalam membangun peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota ke depan, perlu analisis faktor-faktor lingkungan internal maupun eksternal yang sangat dominan berpengaruh dalam proses pembangunan. Indonesia mengalami suatu pandemi yang menyerang dunia peternakan yang disebut dengan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), dimana penyakit ini menyerang hewan berkuku belah seperti sapi, kambing, dan kerbau. Pada tahun 2023 pandemi ini sudah melandai meski masih ada beberapa kasus yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota dan telah ditanggulangi sesuai aturan yang berlaku.

Selain PMK ada beberapa faktor yang dapat mengancam tidak tercapainya produksi pangan asal hewan, yaitu ancaman penyakit hewan, anomali cuaca, peraturan yang kurang mendukung kelestarian usaha peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota serta regulasi import yang kurang berpihak kepada usaha peternakan rakyat.

Koordinasi dan sinergitas dengan kementerian dan dinas pemerintah provinsi yang menangani peternakan tercermin dalam dukungan peningkatan pertumbuhan komoditas peternakan sesuai target Renstra Kementrian Pertanian RI dan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat. Salah satu bentuk sinergitas tersebut adalah Program SIKOMANDAN yang telah dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota sejak Tahun 2020. Untuk daerah Provinsi Sumatera Barat sendiri, Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi salah satu daerah dengan capaian realisasi pelaksanaan program tersebut melebihi target yang diberikan.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan publik dengan 1 urusan, yakni urusan pilihan pertanian dengan 4 bidang yakni Bidang Perbibitan dan Produksi, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan pengolah hasil, Bidang Prasarana dan sarana serta Bidang Penyuluhan.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD

Kebijakan dan strategi dalam membangun peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota ke depan, perlu analisis faktor-faktor

lingkungan internal maupun eksternal yang sangat dominan berpengaruh dalam proses pembangunan. Pada Tabel 2.4 diuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota ditinjau dari pelayanan dinas, Renstra Kementerian Pertanian, kajian RTRW dan KLHS.

Tujuan umum pembangunan peternakan adalah untuk peningkatan populasi dan produktivitas ternak serta keamanan produk yang dihasilkan dan peningkatan daya saing produk peternakan. Seiring dengan meningkatnya permintaan pangan asal hewan yang dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, tingkat pendapatan masyarakat, kesadaran akan kebutuhan gizi, maka perlu upaya-upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan potensi genetiknya, melalui pengembangan komoditas ternak unggul berbasis kawasan dan mengoptimalkan potensi SDA dan SDM yang ada. Beberapa faktor yang dapat mengancam tidak tercapainya produksi pangan asal hewan adalah ancaman penyakit hewan, anomali cuaca, peraturan yang kurang mendukung kelestarian usaha peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota serta regulasi import yang kurang berpihak kepada usaha peternakan rakyat. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi secara rinci dalam membangun peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Pemetaan Permasalahan untuk Penetuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya potensi daerah di bidang peternakan	Optimalisasi pemanfaatan lahan di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota	Komitmen seluruh jajaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam peningkatan produksi dan produkstifitas ternak
2.		Penyusunan RTRW yang kurang mendukung keselarasan usaha peternakan	Keterbatasan penggunaan lahan di bidang peternakan
3.		Kurangnya modal kerja dan SDM dalam pengembangan usaha peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota	Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan publik dalam mendukung fungsi-fungsi pelayanan teknis peternakan dan

			kesehatan hewan
4.		Cuaca dan musim yang ekstrim mengakibatkan fluktusasi produktivitas ternak dan ancaman penyakit menular	Koordinasi dan penentuan kebijakan pembangunan peternakan
5.		Rendahnya pemahaman produsen, konsumen maupun petugas lapangan terhadap produk pangan hewan yang ASUH	Ketersediaan anggaran dan komitmen seluruh jajaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam peningkatan produksi dan produktifitas ternak
6.		Tidak berkembangnya usaha perbibitan di masyarakat	Peraturan pendukung wilayah pengembangan budidaya peternakan besar dan kecil serta unggas
7.		Fluktuasi harga ternak yang membuat usaha peternakan Rakyat mengalami pasang surut sehingga membuat minat masyarakat untuk beternak rendah	Kurangnya informasi pasar dan peningkatan kualitas produk hasil olahan untuk bersaing dipasaran
8.		Ketersediaan potensi SDA, SDM dalam peningkatan produksi dan produktifitas ternak	Melaksanakan Bimtek
9.		Ancaman penyakit akibat tingginya tingkat lalu lintas ternak	Rendahnya pelayanan kesehatan ternak
10.		Mutu bibit yang masih rendah karena penerapan peraturan perbibitan belum sepenuhnya dilaksanakan	Regulasi

11.		Penyusunan RTRW yang kurang mendukung keselarasan usaha peternakan	Keterbatasan lahan peternakan dan alih fungsi lahan
12.		Tingginya alih fungsi lahan	
13.	Meningkatnya daya saing produk	Keterbatasan bahan baku yang berkualitas	Regulasi untuk pemanfaatan lahan pemenuhan kebutuhan bahan baku
			Lemahnya kelembagaan kelompok baik SDM maupun administrasi kelompok
14	Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan PMKS	Pendistribusian ternak ke peternak / kelompok ternak	Belum optimalnya pengelolaan dana bansos pada kelompok tani ternak yang berkaitan dengan rendahnya kapasitas kelompok dan pola pikir kelompok yang beranggapan Bansos dan Hibah tersebut sebagai bantuan lepas

Beberapa permasalahan yang diidentifikasi sesuai tupoksi adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan bidang Perbibitan dan Produksi Ternak :
   a. Masih tingginya pemotongan sapi /kerbau betina produktif
   b. Masih lemahnya pengawasan pelaksanaan Inseminasi Buatan yang dilaksanakan oleh kelompok/swasta maupun aparatur dinas
   c. Belum optimalnya penyebaran sapi pada masayarakat
   d. Belum optimalnya pelaksanaan IB(Inseminasi buatan)
   e. Belum optimalnya pengawasan mutu bibit dan pakan yang beredar.

2. Permasalahan bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masayarakat Veteriner
   a. Belum tersedianya pos lalu lintas ternak didaerah perbatasan dengan provinsi tetangga.
   b. Belum tersedianya rumah potong hewan yang representatif
   c. Masih tingginya kasus rabies dan penyakit menular
   d. Masih tingginya gangguan reproduksi pada ternak sapi.

e. Masih terbatasnya tenaga medis dan paramedis dalam pelayanan ke masyarakat.
f. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan pemerintah nagari dalam mendukung pemberantasan rabies dan penyakit menular ternak.
g. Belum optimalnya pengelolaan produk olahan hasil peternakan
h. Belum tersedianya los daging hygienis

3. Permasalahan bidang Prasaranan dan sarana
   a. Masih rendahnya pengetahuan peternak dalam pengolahan pakan alternatif dengan sumber limbah pertanian.
   b. Belum optimalnya pemanfaatan modal bantuan sosial oleh kelompok penerima.
   c. Belum terlaksananya tugas dan fungsi kasi lahan dan irigasi dalam pemetaan lahan karena belum tersedianya rekening anggaran pendukung.
   d. Belum tersedianya los daging hygienis

4. Permasalahan pada urusan Penyuluhan
   a. Belum tersedianya buku pintar Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
   b. Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga peneliti untuk penerapan temuan teknologi
   c. Belum optimalnya sinergitas kelembagaan dalam pemberdayaan peternak.

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 - 2029 visi Kabupaten Lima Puluh Kota dalam jangka menengah adalah "*Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan"*

Adapun misi pembangunan sebagai penjabaran visi tersebut sebagai berikut:

1. Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"
4. Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"
5. Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing "SAKATO UNGGUL"
6. Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"
7. Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI"

Sehubungan dengan visi, misi kepala daerah dan sasaran RPJMD maka permasalahan yang muncul dapat dilihat pada tabel 2.5 dibawah ini :

Tabel 2.5
Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan Sasaran RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota

No.	Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatnya produksi sektor pertanian dan perikanan sesuai penerapan ekonomi hijau	Kualitas Bibit	Keterbatasan bibit yang berkualitas	Tingginya permintaan bibit mendorong dinas Peternakan Prov untuk menyusun regulasi
2		Rendahnya produksi pangan asal ternak	Keterbatasan jumlah dan kapasitas petugas lapangan	Pemenuhan tenaga lapangan sesuai dengan persyaratan teknis dan peningkatan kapasitasnya
		Tingginya harga kosentrat mempengaruhi kualitas dan kuantitas pakan yang diberikan pada ternak yang berdampak kepada produktifitas ternak	Tingginya harga kosentrat dan ketergantungan terhadap bahan baku impor	Regulasi penyediaan bahan baku pakan ternak
		Rendahnya pelayanan kesehatan ternak dan hewan	Menurunnya status kesehatan ternak	Kapasitas petugas dan sarana dan prasarana yang memadai
		Keterbatasan sarana dan prasarana serta teknologi terapan untuk mendukung produk	Rendahnya SDM peternak	SDM Peternak untuk memanfaatkan teknologi yang ada

No.	Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		peternakan		
		Lemahnya kapasitas kelembagaan peternak dan penyuluh	Keterbatasan jumlah dan tenaga penyuluh serta kurangnya bimtek untuk kelomppok ternak	Peningkatan kapasitas pemnyuluh, peternak dan kelembagaan

Selain adanya beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota juga ada beberapa faktor penghambat sesuai dengan tabel 2.5 diatas.

2.3.3 Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan terhadap Capaian Nasional

Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, dapat berdampak pada tercapaianya visi dan misi kepala daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2025-2029 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yakni Meningkatnya produksi sektor pertanian dan perikanan sesuai penerapan ekonomi hijau . Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalah dengan melakukan berbagai pembenahan dan peningkatan baik itu sember daya aparatur, sarana maupun prasarana dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Adapun bentuk kongkrit yang dilakukan sebagai berikut :

1. Menjalin kerjasama integritas dengan Kementrian Pertanian melalui Program Sikomandan (Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri) bersama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk pencapaian angka populasi dan produksi ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Inseminasi Buatan dan pelayanan kesehatan hewan kepada Masyarakat .
3. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha, kelompok tani ternak serta peternak dalam lingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Menjalankan fungsi UPTD Pembibitan dan Pakan ternak sebagai batu loncatan bagi Kabupaten Lima Puluh Kota dalam hal meningkatkan populasi dan produksi ternak.

2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah

Tantangan dan peluang merupakan faktor yang berasal dari luar/eksternal yang mempengaruhi kinerja Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun tantangan dan hambatan dalam pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

1. Tantangan
   a. Penanganan dampak pandemi PMK
   b. Persaingan dan liberalisasi pasar
   c. Ketergantungan pakan impor
   d. Pengarus iklim yang berpengaruh pada pengadaan pakan dan kesehatan hewan
   e. Adanya ancaman penyakit hewan eksotik sebagai akibat mobilitas hewan yang tidak terkendali
   f. Penurunan angkatan kerja sektor peternakan
   g. Alih fungsi lahan peternakan

2. Peluang
   a. Pasar Produk Peternakan
   b. Adanya kesadaran global (food safety, biosecurity, kesejahteraan hewan dan kualitas lingkungan)
   c. Perkembangan teknologi yang canggih
   d. Meningkatkan jumlah investor bidang peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

2.3.5 Formulasi Isu-isu Penting

Dari berbagai permasalahan yang timbul, beberapa isu-isu strategis sebagai catatan penting yang direkomendasikan untuk dilakukan di tahun-tahun berikutnya adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan program dan kegiatan yang sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka mekanisme manajemen internal Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota harus ditingkatkan, proaktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan.
2. Agar implementasi sistem akuntabilitas kinerja benar-benar efektif, maka diperlukan sinergi antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan output maupun outcame kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergitas tersebut, kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dibiayai oleh APBD benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.
3. Dalam rangka meningkatkan kinerja, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan senantiasa berkoordinasi dengan stakeholder yang dimulai pada saat perencanaan untuk kebutuhan SDM dan sarana prasarana sampai pada pelaksanaan kegiatannya.
4. Diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang disesuaikan dengan bidang tugasnya.
5. Dukungan melalui pembangunan sarana prasarana pendukung pelayanan.
6. Implementasi reward dan punishment yang adil dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabiltas aparatur.

7. Peningkatan pembinaan kelembagaan petani, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kapasistas SDM peternak / petani.
8. Peningkatan aksi pencegahan dan penanggulan penyakit hewan menular, hal tersebut dilakukan melalui kegiatan pemusnahan ternak yang terjangkit endemik, pengawasan perdagangan ternak antar daerah.
9. Peningkatan produksi hasil peternakan, hal tersebut dilakukan melalui beberapa kegiatan antara lain pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak, kegiatan pembibitan dan perawatan ternak, penelitian dan pengolahan gizi pakan ternak, pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak, dan kegiatan pengembangan agribisnis peternakan.
10. Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
11. Peningkatan penerapan teknologi peternakan dimana hal tersebut dilakukan melalui kegiatan Penelitian dan pengembangan tekhnologi peternakan tepat guna, serta pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna.

Sehubungan dengan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka tugas dan fungsi (sesuai dengan program dan kegiatan) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang terkait dengannya, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.6
Program/Kegiatan sesuai dengan Misi RPJMD

Program/Kegiatan	Misi pada RPJMD	Ket
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Meningkatkan pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing (SAKATO UNGGUL)	

Program/Kegiatan	Misi pada RPJMD	Ket
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/Semesteran SKPD C. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD b. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD c. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD d. Rekonsilasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD e. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD D. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		

Program/Kegiatan	Misi pada RPJMD	Ket
a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya d. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan E. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor c. Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan e. Fasilitasi Kunjungan Tamu f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD F. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah a. Pengadaaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan b. Pengadaan Mebel c. Pengadaan Aset Tetap Lainnya G. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor H. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		

Program/Kegiatan	Misi pada RPJMD	Ket
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan b. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
II. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian A. Kegiatan Pengawasan Penggunaan sarana Pertanian a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi b. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian B. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Kabupaten/Kota a. Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil b. Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak C. Kegiatan Pengawasan Obat di Tingkat Pengencer a. Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan b. Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat	Sda	

Program/Kegiatan	Misi pada RPJMD	Ket
Hewan D. Kegiatan Pengedanlian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota a. Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak b. Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit ternak dan Hijauan Pakan Ternak c. Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan E. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota a. Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain b. Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain c. Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		
III. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian A. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya c. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan	Sda	

Program/Kegiatan	Misi pada RPJMD	Ket
Irigasi Usaha Tani B. Kegiatan Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum a. Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum b. Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum		
IV. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner A. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota a. Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis c. Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan d. Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan e. Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis f. Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota B. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota a. Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) b. Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan	Sda	

Program/Kegiatan	Misi pada RPJMD	Ket
Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM c. Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya C. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota a. Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium b. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik veteriner D. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner a. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan b. Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan		
V. Program Perizinan Usaha Pertanian A. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan a. Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan b. Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan c. Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Sda	

Program/Kegiatan	Misi pada RPJMD	Ket
B. Kegiatan Izin Usaha Pengencer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengencer Obat Hewan		
VI. Program Penyuluhan Pertanian A. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian a. Peningkatan Kapasitas Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa b. Pengembangan Kapasitas Kelembangaan Petani di Kecamatan dan Desa c. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian d. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani tingkat Kabupaten/Kota e. Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Meningkatkan pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing (SAKATO UNGGUL)	

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja OPD tersebut disusun adalah untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya renja OPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Dalam melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan

catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

Sesuai Analisis kebutuhan yang dapat dilihat pada tabel 2.7 dibawah ini, dimana Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rancangan Awal RKPD sama dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan hasil analisis kebutuhan.

Jumlah program pada Rancangan Awal RKPD sama dengan jumlah program setelah dilakukan analisis kebutuhan yaitu 6 (enam) program, namun besaran anggaran hasil analisis kebutuhan kurang dari anggaran pada Rancangan Awal RKPD. Perbedaan anggaran yang dimaksud disebabkan oleh adanya peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petujuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Peggunaannya.

Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD disajikan dalam Tabel 2.7 sebagai berikut

TABEL 2.7
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027
Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama Perangkat Daerah : Dinas Peternakan Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN				**12.268.150.000,00**	**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**				**12.268.150.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**12.268.150.000,00**	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**12.268.150.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**12.268.150.000,00**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**12.268.150.000,00**	
1,	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**10.215.000.000,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**10.215.000.000,00**	
				Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	10.215.000.000,00			Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	10.215.000.000,00	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30.000.100,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30.000.100,00	
		-				30.000.100,00	-				30.000.100,00	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	30.000.100,00			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	30.000.100,00	
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				30.000.100,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				30.000.100,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	30.000.100,00	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	12 Laporan	30.000.100,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.342.564.755,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.342.564.755,00	
		-				9.342.564.755,00	-				9.342.564.755,00	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	9.342.564.755,00			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	9.342.564.755,00	
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9.342.564.755,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9.342.564.755,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang /bulan	9.342.564.755,00	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang/bulan	9.342.564.755,00	
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				204.782.044,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah				204.782.044,00	
		-				204.782.044,00	-				204.782.044,00	
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	6.680.744,00			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	6.680.744,00	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	90.000.000,00			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	90.000.000,00	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	77.633.000,00			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	77.633.000,00	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	30.468.300,00			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	30.468.300,00	
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				77.633.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				77.633.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	77.633.000,00	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	77.633.000,00	
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				30.468.300,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				30.468.300,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.468.300,00	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.468.300,00	
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.680.744,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.680.744,00	
		Terlaksananya Fasilitasi	Kab.	Jumlah Laporan Fasilitasi	12	6.680.744,00	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.	Jumlah Laporan Fasilitasi	12	6.680.744,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Kunjungan Tamu	Lima Puluh Kota	Kunjungan Tamu	Laporan			Lima Puluh Kota	Kunjungan Tamu	Laporan		
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				90.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				90.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	90.000.000,00	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	90.000.000,00	
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				32.800.001,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				32.800.001,00	
		-				32.800.001,00	-				32.800.001,00	
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	32.800.001,00			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	32.800.001,00	
	3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				32.800.001,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				32.800.001,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	32.800.001,00	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	32.800.001,00	
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80.762.100,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80.762.100,00	
		-				80.762.100,00	-				80.762.100,00	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	36.902.100,00			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	36.902.100,00	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	43.200.000,00			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	43.200.000,00	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	660.000,00			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	660.000,00	
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				660.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				660.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	660.000,00	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	660.000,00	
	3.27.01.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi,				36.902.100,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya				36.902.100,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	08.0002	Sumber Daya Air dan Listrik					Air dan Listrik					
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	36.902.100,00	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	36.902.100,00	
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				43.200.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				43.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	43.200.000,00	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	43.200.000,00	
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				524.091.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				524.091.000,00	
		-				524.091.000,00	-				524.091.000,00	
				Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-	25.000.000,00			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-	25.000.000,00	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	314.591.000,00			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	314.591.000,00	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	184.500.000,00			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	184.500.000,00	
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				184.500.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				184.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	74 Unit	184.500.000,00	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	74 Unit	184.500.000,00	
	3.27.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				25.000.000,00	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	25.000.000,00	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	25.000.000,00	
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				314.591.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				314.591.000,00	
		Terlaksananya	Kab.	Jumlah Gedung Kantor dan	1 Unit	314.591.000,00	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi	Kab.	Jumlah Gedung Kantor	1 Unit	314.591.000,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Lima Puluh Kota	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Lima Puluh Kota	dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
2,	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**				**1.167.000.000,00**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**				**1.167.000.000,00**	
				Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	7 %	1.117.000.000,00			Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	7 %	1.117.000.000,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				110.000.000,00	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				110.000.000,00	
		-				110.000.000,00	-				110.000.000,00	
				Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	-	110.000.000,00			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	-	110.000.000,00	
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				110.000.000,00	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				110.000.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	110.000.000,00	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	110.000.000,00	
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000,00	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000,00	
		-				50.000.000,00	-				50.000.000,00	
				Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	-	25.000.000,00			Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	-	25.000.000,00	
				Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	-	25.000.000,00			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	-	25.000.000,00	
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				25.000.000,00	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				25.000.000,00	
		Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12 Laporan	25.000.000,00	Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12 Laporan	25.000.000,00	
	3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak				25.000.000,00	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak				25.000.000,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Terawasinya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	12 Laporan	25.000.000,00	Terawasinya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	12 Laporan	25.000.000,00	
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota				25.000.000,00	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota				25.000.000,00	
		-				25.000.000,00	-				25.000.000,00	
				Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat	-	25.000.000,00			Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat	-	25.000.000,00	
	3.27.02.2.05.0007	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak				25.000.000,00	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak				25.000.000,00	
		Terawasinya peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat	12 Laporan	25.000.000,00	Terawasinya peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat	12 Laporan	25.000.000,00	
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain				982.000.000,00	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain				982.000.000,00	
		-				982.000.000,00	-				982.000.000,00	
				Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	-	300.000.000,00			Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	-	300.000.000,00	
				Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	-	682.000.000,00			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	-	682.000.000,00	
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				682.000.000,00	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				682.000.000,00	
		Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	55 Ekor	682.000.000,00	Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	55 Ekor	682.000.000,00	
	3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				300.000.000,00	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				300.000.000,00	
		Tersedianya benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Kab. Lima Puluh	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	5000 Dosis	300.000.000,00	Tersedianya benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	5000 Dosis	300.000.000,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kota									
(1)	(2)	(3)	(10)	(4)	(8)	(9)	(3)	(10)	(4)	(8)	(9)	
3,	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				30.000.000,00	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				30.000.000,00	
				Persentase Penyediaan Prasarana Pertenakan yang Berkualitas	2 %	30.000.000,00			Persentase Penyediaan Prasarana Pertenakan yang Berkualitas	2 %	30.000.000,00	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian				30.000.000,00	Pengembangan Prasarana Pertanian				30.000.000,00	
		-				30.000.000,00	-				30.000.000,00	
				Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	-	30.000.000,00			Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	-	30.000.000,00	
	3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian				30.000.000,00	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian				30.000.000,00	
		Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	1 Dokumen	30.000.000,00	Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	1 Dokumen	30.000.000,00	
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian				0,00	Pembangunan Prasarana Pertanian				0,00	
		-				0,00	-				0,00	
				Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-	0,00			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-	0,00	
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani				0,00	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani				0,00	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Kab. Lima Puluh Kota	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	0,00	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Kab. Lima Puluh Kota	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	0,00	
4,	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				656.150.000,00	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				656.150.000,00	
				Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	2 %	406.150.000,00			Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	2 %	406.150.000,00	
				Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	2 %	225.000.000,00			Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	2 %	225.000.000,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota				225.000.000,00	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota				225.000.000,00	
		-				225.000.000,00	-				225.000.000,00	
				Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	-	50.000.000,00			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	-	50.000.000,00	
				Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	-	25.000.000,00			Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	-	25.000.000,00	
				Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	-	150.000.000,00			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	-	150.000.000,00	
	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular				50.000.000,00	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular				50.000.000,00	
		Tertanggulanginya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	12 Laporan	50.000.000,00	Tertanggulanginya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	12 Laporan	50.000.000,00	
	3.27.04.2.01.0006	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan				25.000.000,00	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan				25.000.000,00	
		Terlaksananya Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	20 Kasus	25.000.000,00	Terlaksananya Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	20 Kasus	25.000.000,00	
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000,00	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000,00	
		Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12 Laporan	150.000.000,00	Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12 Laporan	150.000.000,00	
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota				25.000.000,00	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota				25.000.000,00	
		-				25.000.000,00	-				25.000.000,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	-	25.000.000,00			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	-	25.000.000,00	
	3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)				25.000.000,00	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)				25.000.000,00	
		Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	12 laporan	25.000.000,00	Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	12 laporan	25.000.000,00	
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota				350.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota				350.000.000,00	
		-				350.000.000,00	-				350.000.000,00	
				Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	-	50.000.000,00			Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	-	50.000.000,00	
				Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	-	300.000.000,00			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	-	300.000.000,00	
	3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium				50.000.000,00	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium				50.000.000,00	
		Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	12 Laporan	50.000.000,00	Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	12 Laporan	50.000.000,00	
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner				300.000.000,00	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner				300.000.000,00	
		Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	300.000.000,00	Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	300.000.000,00	
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				56.150.000,00	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				56.150.000,00	
		-				56.150.000,00	-				56.150.000,00	
				Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	-	31.150.000,00			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	-	31.150.000,00	
				Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap	-	25.000.000,00			Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi	-	25.000.000,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				penerpan cara yang baik					terhadap penerpan cara yang baik			
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				31.150.000,00	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				31.150.000,00	
		Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	31.150.000,00	Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	31.150.000,00	
	3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan				25.000.000,00	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan				25.000.000,00	
		Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	10 Unit Usaha	25.000.000,00	Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	10 Unit Usaha	25.000.000,00	
5,	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**				**75.000.000,00**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**				**75.000.000,00**	
				Persentase Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	2 %	25.000.000,00			Persentase Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	2 %	25.000.000,00	
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				75.000.000,00	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				75.000.000,00	
		-				75.000.000,00	-				75.000.000,00	
				Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	-	25.000.000,00			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	-	25.000.000,00	
				Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	-	25.000.000,00			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	-	25.000.000,00	
				Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	-	25.000.000,00			Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	-	25.000.000,00	
	3.27.06.2.01.0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian				25.000.000,00	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian				25.000.000,00	
		Tersusunnya Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Kab. Lima Puluh Kota	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	25.000.000,00	Tersusunnya Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Kab. Lima Puluh Kota	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	25.000.000,00	
	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				25.000.000,00	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				25.000.000,00	
		Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian	Kab. Lima	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan	15 Doku	25.000.000,00	Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha	Kab. Lima	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian	15 Dokumen	25.000.000,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Puluh Kota	Teknis Izin Usaha Pertanian	men		Pertanian	Puluh Kota	Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian			
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian				25.000.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian				25.000.000,00	
		Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	12 Laporan	25.000.000,00	Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	12 Laporan	25.000.000,00	
6,	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**				**125.000.000,00**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**				**125.000.000,00**	
				Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang dibentuk dan beroperasi	2 %	125.000.000,00			Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang dibentuk dan beroperasi	2 %	125.000.000,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				125.000.000,00	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				125.000.000,00	
		-				125.000.000,00	-				125.000.000,00	
				Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan ditingkatkan kapasitasnya	-	125.000.000,00			Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan ditingkatkan kapasitasnya	-	125.000.000,00	
	3.27.07.2.01.0013	Penumbuhkembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa				125.000.000,00	Penumbuhkembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa				125.000.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan Kelemagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan ditingkatkan kapasitasnya	13 Unit	125.000.000,00	Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan Kelemagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan ditingkatkan kapasitasnya	13 Unit	125.000.000,00	
	J U M L A H					**12.268.150.000,00**					**12.268.150.000,00**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat terdiri dari Usulan Musrenbang dan Reses Dewan yang di sesuaikan dengan program dan kegiatan yang ada pada Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota melalui kamus usulan Tahun 2027.

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2027
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikakor Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1.	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	2 Unit	Bantuan Hibah mesin Copper untuk kelompok tani
2.	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari	570 ekor	bantuan ternak sapi,kambing,ayam,itik
3.	Pengawasan hewan dan produk hewan	Nagari Koto Tangah, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah sosialisasi pemotongan hewan kurban di Mesjid	1 Kegiatan	Musrenbang

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan pertanian di daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)Tahun 2025-2029,sasaran utama pembangunan nasional yang harus dicapai antara lain: Sasaran Pembangunan 1 yakni Meningkatkan pendapatan perkapita menuju setara negara maju, Sasaran Pembangunan 2 yakni Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional, Sasaran Pembangunan 3 yakni Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, Sasaran Pembangunan 4 yakni Daya Saing Sumber Daya Manusia meningkat dan Sasaran Pembangunan 5 yakni Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca menurun menuju net Zero emission.

Berdasarkan Permendagri No. 32 Tahun 2012 prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang pro-growth, pro-job, pro-poor dan pro-environtment. Oleh karena itu perencanaan pembangunan pertanian yang disusun oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan harus mengacu dan menguatkan serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional ini.

Sementara itu, Program Prioritas Kementerian Pertanian dalam membangun pertanian di Indonesia adalah dengan mendukung swasmbada pangan berkelenjutan dan hilirisasi komoditas pertanian dengan langkah sebagai berikut:

a. Pengelolaan Air dan Irigasi Lahan Konservasi & Rehabilitasi dan jalan usahan tani.
b. Cetak sawah dan optimalisasi lahan.
c. Peningkatan Produksi Padi, Jagung & Komoditas Startegi Lainnya.
d. Penyediaan benih unggul, Alsintan (Pra & Pasca Panen) dan Pupuk Subsidi
e. Penyuluhan dan Regenerasi Petani
f. Hilirisasi Pertanian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perencanaan pembangunan pertanian bidang peternakan diarahkan agar dapat memprioritaskan:

1. *Peningkatan Produksi pertanian*, melalui ektstensifikasi maupun intensifikasi pertanian bidang peternakan, dimana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan indikator meningkatkan populasi ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. *Peningkatan Produktivitas,* sehingga dengan luasan lahan yang sama, petani/peternakan bisa memperoleh nilai tambah dari hasil usaha tani/ternak yang dilakukannya.
3. *Peningkatan Mutu,* adalah usaha untuk menambah kualitas dan daya saing hasil pertanian bidang peternakan.
4. *Peningkatan Kesejahteraan Petani,* adalah tingkatan kondisi di mana petani/peternak sudah berada dalam keadaan bebas dari ketergantungan dan mampu mengembangkan usahanya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan Pembangunan Pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota dan membantu Bupati Lima Puluh Kota dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas dalam mendukung pembangunan daerah.

Dalam rangka mensukseskan Misi Kepala Daerah yaitu Misi ke 5 Yaitu Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya Saing "SAKATO UNGGUL" maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota menerjemahkan misi tersebut kedalam tujuan dinas yaitu Revitalisasi Pertanian Menuju Agroindustri.

TABEL 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	NPSK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	1. TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)	Meningkatnya Produksi Sektor Pertanian dan Perikanan sesuai Penerapan Ekonomi Hijau	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	5%	7%	7%	7%	7%	7%
	2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan dan Penanggulangan Penyakit Hewan		Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian yang Berkualitas	0%	2%	2%	2%	2%	2%
	3. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah		Peningkatan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kesehatan Hewan Menular Strategis (PHMS)	2%	2%	2%	2%	2%	2%
	3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan			Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki sertifikat Pra NKV atau NKV	-	2%	2%	2%	2%	2%

NO	NPSK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	1. TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 25 Tahun 2023 tentang Peningkatan Nilai Tambah, Penguatan Daya Saing, dan Pemasaran Hasil Peternakan		Peningkatan Perizinan Usaha pertanian	Persentase Peningkatan Usaha Pertanian yang diterbitkan	2%	2%	2%	2%	2%	2%
	5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 12 Tahun 2025 tentang Pelayanan Perkawinan Ternak		peningkatan kualitas penyuluhan pertanian	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan penyuluh pertanian	2%	2%	2%	2%	2%	2%
	5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 14 Tahun 2025 tentang Persyaratan Pemasukan Ternak dalam hal tertentu yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara asal pemasukan			Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi	2%	2%	2%	2%	2%	2%
	Sasaran RPJMD Meningkatnya Produksi Sektor Pertanian dan Perikanan sesuai Penerapan Ekonomi Hijau		Meningkatnya akuntabilitas kinerja, keuangan dan reformasi birokrasi	Nilai indeks reformasi birokrasi	2%	4%	6%	8%	10%	12%

3.3. Program Dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
   Usulan program dan kegiatan disusun berdasarkan target IKU yang ingin dicapai berpedoman pada Renstra yang telah ada. Berdasarkan IKU Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota, program dan kegiatan diarahkan untuk mencapai peningkatan populasi dan produksi ternak dengan target peningkatan populasi ternak sapi menjadi 100.000 ekor dan populasi ternak kambing menjadi 1 juta ekor. Semua Program dan Kegiatan yang telah dirumuskan merupakan Program dan Kegiatan yang mendukung program unggulan Kepala Daerah mulai dari hulu (pemeliharaan dan pengadaan ternak) sampai hilir (pemasaran), setelah pagu indikatif ditetapkan maka Program dan Kegiatan akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
   Program dan Kegiatan yang telah disusun oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

Tabel 3.2
Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2027 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota

Program/Kegiatan	Ket
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
a. Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	
d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD	
e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	

Program/Kegiatan	Ket
g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/Semesteran SKPD 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD b. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD c. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD d. Rekonsilasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD e. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah a. Pengadaaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya d. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor c. Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan e. Fasilitasi Kunjungan Tamu f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah a. Pengadaaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan b. Pengadaan Mebel c. Pengadaan Aset Tetap Lainnya 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan b. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	

Program/Kegiatan	Ket
Lainnya	
II. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 1. Kegiatan Pengawasan Penggunaan sarana Pertanian a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi b. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 2. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Kabupaten/Kota a. Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil b. Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak 3. Kegiatan Pengawasan Obat di Tingkat Pengencer a. Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan b. Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan 4. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota a. Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak b. Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit ternak dan Hijauan Pakan Ternak c. Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan 5. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota a. Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain b. Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain c. Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
III. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 1. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya c. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 2. Kegiatan Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum a. Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	

Program/Kegiatan	Ket
b. Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	
IV. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 1. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota a. Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis c. Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan d. Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan e. Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis f. Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota a. Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) b. Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM c. Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya 3. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota a. Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium b. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik veteriner 4. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner a. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan b. Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	
V. Program Perizinan Usaha Pertanian 1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan a. Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan b. Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan c. Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan 2. Kegiatan Izin Usaha Pengencer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	

Program/Kegiatan	Ket
a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengencer Obat Hewan	
VI. Program Penyuluhan Pertanian 1. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian a. Peningkatan Kapasitas Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa b. Pengembangan Kapasitas Kelembangaan Petani di Kecamatan dan Desa c. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian d. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani tingkat Kabupaten/Kota e. Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	

c. Penjelasan ketidak sesuaian rumusan program dan kegiatan dengan Rancangan Awal RKPD

Program dan Kegiatan pada Rancangan Akhir RKPD tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, hal ini disebabkan karena :

1. Terbitnya draft permendagri tentang nomenklatur Sub Kegiatan Tahun 2023.
2. Adanya penyesuaian pagu indikatif terkait anggaran tahun 2025 yang mengacu pada PMK 097 Tahun 2023 dan PMK 067 Tahun 2023.

Tabel 3.3

Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota

(Analisa data Capaian Kinerja Tahun 2025)

No	Bidang Urusan dan Indikator Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Malampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
I	Pertanian			
1	Persentase Peningkatan populasi dan produksi ternak yang berkualitas	Sesuai		1. Bibit Ternak yang berkualitas 2. Manajemen Pemeliharaan Ternak 3. Pakan Ternak yang Berkualitas
2	Persentase penurunan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan Zoonosis (Penyakit Hewan yang Menular ke Manusia)	Sesuai		1. Bibit Ternak yang berkualitas 2. Manajemen Pemeliharaan Ternak 3. Pakan Ternak yang Berkualitas

3	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Ternak yang berkembang	Sesuai		Peningkatan pengetahuan peternak dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tabel 3.4
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pendukungan Prioritas Kabupaten

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penguatan kelembagaan ,registribusi lahan,ketersediaan sarana dan prasarana produksi	Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	
			Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	
			Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	
			Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	
			Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	
			Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	
			Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	
			Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	
			Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	
			Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	
			Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	
			Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	
			Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	
			1.3.5 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	
			1.3.6 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	
			1.4 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	
			1.4.1 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
			1.4.2 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
			1.4.3 Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
			Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	
			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	
			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	
			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	
			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	
			Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	
			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	
			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	
			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	
			Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	
			Pembangunan Prasarana Pertanian	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	
			Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
			Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Balai Inseminasi Buatan	
			Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan	
			Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	
			Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
			Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	
			Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	
			Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	
			Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	
			Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	
			Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	
			2 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATANMASYARAKAT VETERINER	
			2.1 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	
			2.1.1 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	
			2.1.2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	
			2.1.3 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	
			2.1.4 Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	
			2.1.5 Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis	
			2.1.6 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.2 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.2.1 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	
			2.2.2 Pengawasan Peredaran Produk Hewan	
			2.2.3 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	
			2.2.4 Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	
			2.3 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.3.1 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	
			2.3.2 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	
			2.4 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
			2.4.1 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	
			2.4.2 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	
			2.4.3 Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	
			2.4.4 Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	
			2.4.5 Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan	
			2.4.6 Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	
			2.4.7 Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	
			2.4.8 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	
			2.5 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	
			2.5.1 Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	
			2.5.2 Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	
			3 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	
			3.1 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			3.2 Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	
			3.3 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	
			3.4 Sertifikasi unit usaha Pembibitan/Budidaya Ternak	
			3.5 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	
			3.2 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	
			3.2.1 Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	
			3.2.2 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	
			3.2.3 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	
			3.2.4 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	
			3.2.5 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	
			3.3 Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	
			3.3.1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	
			3.3.2 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	
			4 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
			4.1 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
			4.1.1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
			4.1.2 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
			4.1.3 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	
			4.1.4 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	
			4.1.5 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	
			4.1.6 Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	
			4.1.7 Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	
			4.1.8 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	
			4.2 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
			4.2.1 Pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota	
			4.2.2 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
			4.2.3 Pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	
			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	
			Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	

Tabel 3.5
Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Hewan Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN						**12.268.150.000,00**							**11.538.700.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**		100%	100%	100%		**12.268.150.000,00**						100%	**11.538.700.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**		100%	100%	100%		**12.268.150.000,00**						100%	**11.538.700.000,00**	
1	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**10.215.000.000,00**	**Kabupaten Lima Puluh Kota**					**100%**	**9.921.700.000,00**	**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**
			Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	10.215.000.000,00						100%	9.921.700.000,00	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						30.000.100,00					-		32.000.000,00	
		-						30.000.100,00					-		32.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	12 Laporan	-	-	30.000.100,00						-	32.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						30.000.100,00							32.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	12 Laporan	-	12 Laporan	30.000.100,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		5 Laporan	32.000.000,00	
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.342.564.755,00					-		8.990.000.000,00	
		-						9.342.564.755,00					-		8.990.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	92 Orang/Bulan	96 Orang/Bulan	-	9.342.564.755,00						-	8.990.000.000,00	
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						9.342.564.755,00							8.990.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	92 Orang/Bulan	92 Orang/Bulan	94 Orang/Bulan	9.342.564.755,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		94 orang/bulan	8.990.000.000,00	
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						204.782.044,00					-		215.000.000,00	
		-						204.782.044,00					-		215.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	100%	-	-	6.680.744,00						100%	7.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	100%	-	90.000.000,00						100%	95.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	100%	100%	-	77.633.000,00						100%	80.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100%	100%	100%	-	30.468.300,00						100%	33.000.000,00	
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						77.633.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	12 Paket	12 Paket	12 Paket	77.633.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		12 Paket	80.000.000,00	
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						30.468.300,00							33.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100%	12 Paket	12 Paket	12 Paket	30.468.300,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		12 Paket	33.000.000,00	
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						6.680.744,00							7.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	12 Laporan	-	12 Laporan	6.680.744,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		12 Laporan	7.000.000,00	
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						90.000.000,00							95.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	2 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	90.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		12 Laporan	95.000.000,00	
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						32.800.001,00					-		0	
		-						32.800.001,00					-		0	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100%	100%	-	-	32.800.001,00						-	0	
	3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						32.800.001,00							0	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100%	-	-	1 Unit	32.800.001,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	0	
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						80.762.100,00					-		82.200.000,00	
		-						80.762.100,00					-		82.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	100%	100%	-	36.902.100,00						100%	38.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	100%	100%	-	43.200.000,00						100%	43.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100%	100%	-	660.000,00						100%	1.000.000,00	
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						660.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	12 Laporan	-	12 Laporan	660.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		12 Laporan	1.000.000,00	
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						36.902.100,00							38.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	36.902.100,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		12 Laporan	38.000.000,00	
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						43.200.000,00							43.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	12 Laporan	-	12 Laporan	43.200.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		12 Laporan	43.200.000,00	
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						524.091.000,00					-		602.500.000,00	
		-						524.091.000,00					-		602.500.000,00	
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	100%	100%	100%	-	25.000.000,00						100%	27.500.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	100%	100%	-	314.591.000,00						100%	375.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	100%	100%	-	184.500.000,00						100%	200.000.000,00	
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						184.500.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	58 Unit	89 Unit	74 Unit	184.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		89 Unit	200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
	3.27.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						25.000.000,00							27.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	100%	30 Unit	11 Unit	10 Unit	25.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		11 Unit	27.500.000,00	
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						314.591.000,00							375.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	-	-	1 Unit	314.591.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Unit	375.000.000,00	
2	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**1.062.000.000,00**	**Kabupaten Lima Puluh Kota**						**576.000.000,00**	**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**
			Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	12%	7,91%	7%	7%	1.062.000.000,00						7%	576.000.000,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						55.000.000,00					Terlaksananya Pengawasan penggunaan sarana pertanian		0	
		-						55.000.000,00					Terlaksananya Pengawasan penggunaan sarana pertanian		0	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12%			-	55.000.000,00						12 Laporan	0	
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian						55.000.000,00							0	
		Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	100%	-	-	1 Laporan	55.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		12 Laporan	0	
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00					-		52.000.000,00	
		-						50.000.000,00					-		52.000.000,00	
			Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	12%			-	25.000.000,00						7%	26.000.000,00	
			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12%			-	25.000.000,00						7%	26.000.000,00	
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil						25.000.000,00							26.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	100%	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		12 Laporan	26.000.000,00	
	3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak						25.000.000,00							26.000.000,00	
		Terawasinya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	100%	-	-	12 Laporan	25.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		12 Laporan	26.000.000,00	
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota						25.000.000,00					-		26.000.000,00	
		-						25.000.000,00					-		26.000.000,00	
			Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat	12%	-	-	-	25.000.000,00						7%	26.000.000,00	
	3.27.02.2.05.0007	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak						25.000.000,00							26.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Terawasinya peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak	Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat	100%			12 Laporan	25.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		12 Laporan	26.000.000,00	
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain						982.000.000,00					-		550.000.000,00	
		-						982.000.000,00					-		550.000.000,00	
			Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	12%			-	300.000.000,00						7%	350.000.000,00	
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	12%			-	682.000.000,00						7%	200.000.000,00	
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain						682.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	100%		1200 Ekor	55 Ekor	682.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		100	200.000.000,00	
	3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain						300.000.000,00							350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Tersedianya benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	100%		5000 Dosis	5000 Dosis	300.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		100	350.000.000,00	
3	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**85.000.000,00**	**Kabupaten Lima Puluh Kota**						**32.000.000,00**	**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**
			Persentase Penyediaan Prasarana Pertenakan yang Berkualitas	12%		-	2%	85.000.000,00						2%	32.000.000,00	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian						30.000.000,00					-		32.000.000,00	
		-						30.000.000,00					-		32.000.000,00	
			Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	12%			-	30.000.000,00						2%	32.000.000,00	
	3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian						30.000.000,00							32.000.000,00	
		Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	100%			1 Dokumen	30.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		12 Laporan	32.000.000,00	
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian						55.000.000,00					-		0	
		-						55.000.000,00					-		0	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	12%			-	55.000.000,00						2%	0	
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani						55.000.000,00							0	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	100%			1 Unit	55.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Unit	0	
4	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**						**556.150.000,00**	**Kabupaten Lima Puluh Kota**						**596.000.000,00**	**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**
			Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	12%		2%	2%	406.150.000,00						2%	431.000.000,00	
			Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	12%			2%	225.000.000,00						2%	246.000.000,00	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota						225.000.000,00					-		246.000.000,00	
		-						225.000.000,00					-		246.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	12%			-	50.000.000,00						2%	55.000.000,00	
			Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	12%			-	25.000.000,00						2%	26.000.000,00	
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12%			-	150.000.000,00						2%	165.000.000,00	
	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tertanggulanginya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	100%			12 Laporan	50.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		100%	55.000.000,00	
	3.27.04.2.01.0006	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan						25.000.000,00							26.000.000,00	
		Terlaksananya Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	100%			20 Kasus	25.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		100%	26.000.000,00	
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						150.000.000,00							165.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	100%	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		100%	165.000.000,00	
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota						25.000.000,00					-		26.000.000,00	
		-						25.000.000,00					-		26.000.000,00	
			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	12%			-	25.000.000,00						2%	26.000.000,00	
	3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)						25.000.000,00							26.000.000,00	
		Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	100%			12 laporan	25.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		100%	26.000.000,00	
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota						350.000.000,00					-		405.000.000,00	
		-						350.000.000,00					-		405.000.000,00	
			Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	12%			-	50.000.000,00						2%	55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12%			-	300.000.000,00						2%	350.000.000,00	
	3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	100%			12 Laporan	50.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		100%	55.000.000,00	
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner						300.000.000,00							350.000.000,00	
		Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	100%		12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		100%	350.000.000,00	
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner						56.150.000,00					-		52.000.000,00	
		-						56.150.000,00					-		52.000.000,00	
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12%			-	31.150.000,00						2%	26.000.000,00	
			Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	12%			-	25.000.000,00						2%	26.000.000,00	
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan						31.150.000,00							26.000.000,00	
		Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	100%			12 Laporan	31.150.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		100%	26.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
	3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan						25.000.000,00							26.000.000,00	
		Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	100%	12 Unit usaha	10 Unit usaha	10 Unit Usaha	25.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		100%	26.000.000,00	
5	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**						**25.000.000,00**	**Kabupaten Lima Puluh Kota**						**26.000.000,00**	**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**
			Persentase Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	12%			2%	25.000.000,00						2%	26.000.000,00	
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						75.000.000,00					-		78.000.000,00	
		-						75.000.000,00					-		78.000.000,00	
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	12%			-	25.000.000,00						2%	26.000.000,00	
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	12%			-	25.000.000,00						2%	26.000.000,00	
			Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	12%			-	25.000.000,00						2%	26.000.000,00	
	3.27.06.2.01.0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian						25.000.000,00							26.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Tersusunnya Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	100%			1 Dokumen	25.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		100%	26.000.000,00	
	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian						25.000.000,00							26.000.000,00	
		Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	100%			15 Dokumen	25.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		100%	26.000.000,00	
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian						25.000.000,00							26.000.000,00	
		Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	100%			12 Laporan	25.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		100%	26.000.000,00	
6	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**						**125.000.000,00**	**Kabupaten Lima Puluh Kota**						**150.000.000,00**	**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**
			Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang dibentuk dan beroperasi	12%			2%	125.000.000,00						2%	150.000.000,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						125.000.000,00					-		150.000.000,00	
		-						125.000.000,00					-		150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
			Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan ditingkatkan kapasitasnya	12%			-	125.000.000,00						2%	150.000.000,00	
	3.27.07.2.01.0013	Penumbuhkembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa						125.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan Kelemagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan ditingkatkan kapasitasnya	100%	4 Unit	-	13 Unit	125.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		100%	150.000.000,00	
	J U M L A H							**12.268.150.000,00**							**11.538.700.000,00**	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang merupakan bagian integral pembangunan pertanian sub sektor peternakan pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani dan mendorong berkembangnya usaha-usaha peternakan, sehingga memiliki nilai tambah, daya saing dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat peternakan.

Tabel 4.1
Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027

No	Bidang Urusan	2026			2027			Ket
		Jumlah		Total Pagu Indikatif (Rp)	Jumlah		Total Pagu Indikatif (Rp)	
		Program	Kegiatan		Program	Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	6	21	34.778.120.848	6	21	36.517.026.890	

Tabel 4.2
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN						**12.268.150.000,00**							**11.538.700.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**		100%	100%	100%		**12.268.150.000,00**						100%	**11.538.700.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**		100%	100%	100%		**12.268.150.000,00**						100%	**11.538.700.000,00**	
1	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**10.215.000.000,00**	**Kabupaten Lima Puluh Kota**					**100%**	**9.921.700.000,00**	**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**
			Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	10.215.000.000,00						100%	9.921.700.000,00	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						30.000.100,00					-		32.000.000,00	
		-						30.000.100,00					-		32.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	12 Laporan	-	-	30.000.100,00						-	32.000.000,00	
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						30.000.100,00							32.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	12 Laporan	-	12 Laporan	30.000.100,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		5 Laporan	32.000.000,00	
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.342.564.755,00					-		8.990.000.000,00	
		-						9.342.564.755,00					-		8.990.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	92 Orang/Bulan	96 Orang/Bulan	-	9.342.564.755,00						-	8.990.000.000,00	
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						9.342.564.755,00							8.990.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	92 Orang/Bulan	92 Orang/Bulan	94 Orang/Bulan	9.342.564.755,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		94 orang/bulan	8.990.000.000,00	
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						204.782.044,00					-		215.000.000,00	
		-						204.782.044,00					-		215.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	100%	-	-	6.680.744,00						100%	7.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	100%	-	90.000.000,00						100%	95.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	100%	100%	-	77.633.000,00						100%	80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100%	100%	100%	-	30.468.300,00						100%	33.000.000,00	
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						77.633.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	12 Paket	12 Paket	12 Paket	77.633.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		12 Paket	80.000.000,00	
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						30.468.300,00							33.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100%	12 Paket	12 Paket	12 Paket	30.468.300,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		12 Paket	33.000.000,00	
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						6.680.744,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	12 Laporan	-	12 Laporan	6.680.744,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		12 Laporan	7.000.000,00	
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						90.000.000,00							95.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	2 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	90.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		12 Laporan	95.000.000,00	
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						32.800.001,00					-		0	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		-						32.800.001,00					-		0	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100%	100%	-	-	32.800.001,00						-	0	
	3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						32.800.001,00							0	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100%	-	-	1 Unit	32.800.001,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	0	
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						80.762.100,00					-		82.200.000,00	
		-						80.762.100,00					-		82.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	100%	100%	-	36.902.100,00						100%	38.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	100%	100%	-	43.200.000,00						100%	43.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100%	100%	-	660.000,00						100%	1.000.000,00	
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						660.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	12 Laporan	-	12 Laporan	660.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		12 Laporan	1.000.000,00	
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						36.902.100,00							38.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	36.902.100,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		12 Laporan	38.000.000,00	
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						43.200.000,00							43.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	12 Laporan	-	12 Laporan	43.200.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		12 Laporan	43.200.000,00	
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						524.091.000,00					-		602.500.000,00	
		-						524.091.000,00					-		602.500.000,00	
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	100%	100%	100%	-	25.000.000,00						100%	27.500.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	100%	100%	-	314.591.000,00						100%	375.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	100%	100%	-	184.500.000,00						100%	200.000.000,00	
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						184.500.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	58 Unit	89 Unit	74 Unit	184.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		89 Unit	200.000.000,00	
	3.27.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						25.000.000,00							27.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	100%	30 Unit	11 Unit	10 Unit	25.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		11 Unit	27.500.000,00	
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						314.591.000,00							375.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	-	-	1 Unit	314.591.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Unit	375.000.000,00	
2	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**1.062.000.000,00**	**Kabupaten Lima Puluh Kota**						**576.000.000,00**	**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**
			Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	12%	7,91%	7%	7%	1.062.000.000,00						7%	576.000.000,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						55.000.000,00					Terlaksananya Pengawasan penggunaan sarana pertanian		0	
		-						55.000.000,00					Terlaksananya Pengawasan penggunaan sarana pertanian		0	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12%			-	55.000.000,00						12 Laporan	0	
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian						55.000.000,00							0	
		Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	100%	-	-	1 Laporan	55.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		12 Laporan	0	
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00					-		52.000.000,00	
		-						50.000.000,00					-		52.000.000,00	
			Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	12%			-	25.000.000,00						7%	26.000.000,00	
			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12%			-	25.000.000,00						7%	26.000.000,00	
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil						25.000.000,00							26.000.000,00	
		Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	100%	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		12 Laporan	26.000.000,00	
	3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak						25.000.000,00							26.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Terawasinya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	100%	-	-	12 Laporan	25.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		12 Laporan	26.000.000,00	
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota						25.000.000,00					-		26.000.000,00	
		-						25.000.000,00					-		26.000.000,00	
			Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat	12%	-	-	-	25.000.000,00						7%	26.000.000,00	
	3.27.02.2.05.0007	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak						25.000.000,00							26.000.000,00	
		Terawasinya peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak	Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat	100%			12 Laporan	25.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		12 Laporan	26.000.000,00	
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain						982.000.000,00					-		550.000.000,00	
		-						982.000.000,00					-		550.000.000,00	
			Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	12%			-	300.000.000,00						7%	350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	12%			-	682.000.000,00						7%	200.000.000,00	
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain						682.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	100%		1200 Ekor	55 Ekor	682.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		100	200.000.000,00	
	3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain						300.000.000,00							350.000.000,00	
		Tersedianya benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	100%		5000 Dosis	5000 Dosis	300.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		100	350.000.000,00	
3	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**85.000.000,00**	**Kabupaten Lima Puluh Kota**						**32.000.000,00**	**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**
			Persentase Penyediaan Prasarana Pertenakan yang Berkualitas	12%		-	2%	85.000.000,00						2%	32.000.000,00	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian						30.000.000,00					-		32.000.000,00	
		-						30.000.000,00					-		32.000.000,00	
			Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	12%			-	30.000.000,00						2%	32.000.000,00	
	3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian						30.000.000,00							32.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	100%			1 Dokumen	30.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		12 Laporan	32.000.000,00	
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian						55.000.000,00					-		0	
		-						55.000.000,00					-		0	
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	12%			-	55.000.000,00						2%	0	
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani						55.000.000,00							0	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	100%			1 Unit	55.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Unit	0	
4	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**						**556.150.000,00**	**Kabupaten Lima Puluh Kota**						**596.000.000,00**	**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**
			Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	12%		2%	2%	406.150.000,00						2%	431.000.000,00	
			Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	12%			2%	225.000.000,00						2%	246.000.000,00	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota						225.000.000,00					-		246.000.000,00	
		-						225.000.000,00					-		246.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	12%			-	50.000.000,00						2%	55.000.000,00	
			Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	12%			-	25.000.000,00						2%	26.000.000,00	
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12%			-	150.000.000,00						2%	165.000.000,00	
	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tertanggulanginya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	100%			12 Laporan	50.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		100%	55.000.000,00	
	3.27.04.2.01.0006	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan						25.000.000,00							26.000.000,00	
		Terlaksananya Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	100%			20 Kasus	25.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		100%	26.000.000,00	
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						150.000.000,00							165.000.000,00	
		Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	100%	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		100%	165.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota						25.000.000,00					-		26.000.000,00	
		-						25.000.000,00					-		26.000.000,00	
			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	12%			-	25.000.000,00						2%	26.000.000,00	
	3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)						25.000.000,00							26.000.000,00	
		Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	100%			12 laporan	25.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		100%	26.000.000,00	
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota						350.000.000,00					-		405.000.000,00	
		-						350.000.000,00					-		405.000.000,00	
			Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	12%			-	50.000.000,00						2%	55.000.000,00	
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12%			-	300.000.000,00						2%	350.000.000,00	
	3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	100%			12 Laporan	50.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		100%	55.000.000,00	
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner						300.000.000,00							350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	100%		12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		100%	350.000.000,00	
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner						56.150.000,00					-		52.000.000,00	
		-						56.150.000,00					-		52.000.000,00	
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12%			-	31.150.000,00						2%	26.000.000,00	
			Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	12%			-	25.000.000,00						2%	26.000.000,00	
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan						31.150.000,00							26.000.000,00	
		Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	100%			12 Laporan	31.150.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		100%	26.000.000,00	
	3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan						25.000.000,00							26.000.000,00	
		Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	100%	12 Unit usaha	10 Unit usaha	10 Unit Usaha	25.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		100%	26.000.000,00	
5	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**						**25.000.000,00**	**Kabupaten Lima Puluh Kota**						**26.000.000,00**	**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**
			Persentase Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	12%			2%	25.000.000,00						2%	26.000.000,00	
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						75.000.000,00					-		78.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		-						75.000.000,00					-		78.000.000,00	
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	12%			-	25.000.000,00						2%	26.000.000,00	
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	12%			-	25.000.000,00						2%	26.000.000,00	
			Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	12%			-	25.000.000,00						2%	26.000.000,00	
	3.27.06.2.01.0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian						25.000.000,00							26.000.000,00	
		Tersusunnya Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	100%			1 Dokumen	25.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		100%	26.000.000,00	
	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian						25.000.000,00							26.000.000,00	
		Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	100%			15 Dokumen	25.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		100%	26.000.000,00	
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian						25.000.000,00							26.000.000,00	
		Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	100%			12 Laporan	25.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		100%	26.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
6	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**						**125.000.000,00**	**Kabupaten Lima Puluh Kota**						**150.000.000,00**	**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**
			Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang dibentuk dan beroperasi	12%			2%	125.000.000,00						2%	150.000.000,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						125.000.000,00					-		150.000.000,00	
		-						125.000.000,00					-		150.000.000,00	
			Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan ditingkatkan kapasitasnya	12%			-	125.000.000,00						2%	150.000.000,00	
	3.27.07.2.01.0013	Penumbuhkembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa						125.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan Kelemagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan ditingkatkan kapasitasnya	100%	4 Unit	-	13 Unit	125.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		100%	150.000.000,00	
	J U M L A H							**12.268.150.000,00**							**11.538.700.000,00**	

Pada bagian ini dikemukakan Rencana Kinerja OPD tahun 2026 sesuai IKU Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota :

Tabel 4.3
RENCANA KINERJA IKU KEPALA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2026	Target 2027	Ket
1	Meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian (Sektor Peternakan)	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	33,24	33,96	

RENCANA KINERJA IKU DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2027 (%)	Target 2028 (%)	Ket
1	Meningkatnya Populasi dan Produktifitas peternakan	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	33,96	34,68	
		Nilai SAKIP Dinas	77,09	77,39	

Dinas Peternakan mendukung Misi Kepala Daerah Misi ke 5 Yaitu Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya Saing "SAKATO UNGGUL" dengan Sasaran Meningkatnya produksi sektor pertanian dan perikanan sesuai penerapan ekonomi hijau dengan Indikator Kinerja Utamanya Persentase (%) Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan Perikanan.


50
KABUPATEN 50 KOTA

BAB V
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Utama adalah metric finansial atau non finansial yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. IKU Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025-2030 ada 7 Indikator kinerja utama dan target selama 5 tahun yang akan di capai , hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 5.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	REALISASI	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	31,45	32,08	32,52	33,24	33,96	34,68	35,4	36,12	
2	Nilai SAKIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	%	76,18	75,14	76,48	76,96	77,09	77,39	77,70	78,00	

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota

Dari tabel diatas dapat dilihat masing- masing target pada setiap indikator yang telah ditetapkan adalah untuk meningkatkan Meningkatkan populasi dan produksi komoditi peternakan sesuai target kinerja dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.

1. **Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

   Indikator Kinerja Kunci adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang digunakan untuk mengukur pencapaian terhadap sasaran atau target tertentu dalam jangka waktu tertentu. IKK digunakan untuk memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Indikator Kinerja Kunci Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Persentase Penurunan Kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular. Berikut ini adalah tabel IKK yang akan dicapai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan beserta target yang akan dicapai selama 5 tahun ke depan.

Tabel 5.2 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	31,45	**32,52**	**33,24**	**33,96**	**34,68**	**35,4**	**36,12**	
2	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	%	2	7	7	7	7	7	7	
3	Persentase Penyediaan Prasarana Peternakan yang Berkualitas	%	2	0	2	2	2	2	2	

4	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV	%	-	-	2	2	2	2	2	
5	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	
6	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	%	-	2	2	2	2	2	2	
7	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	%	-	2	2	2	2	2	2	
8	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	%	-	2	2	2	2	2	2	

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota

Tabel 5.2 di atas menampilkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2030 yang mencakup Urusan Pemerintah Bidang Pertanian yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada bidang Perbibitan dan Produksi Ternak indikator pertama adalah Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan yang di targetkan 5 persen setiap tahun hingga 2030. Hal ini menunjukkan komitmen penuh untuk memastikan peningkatan populasi dan produktivitas dalam peningkatan kontribusi PDRB Sektor Pertanian bidang Peternakan secara maksimal. Selanjutnya, Persentase Penyediaan Prasarana Peternakan yang Berkualitas yang ditargetkan sebesar 2 persen sepanjang periode, sebagai upaya pendukung kelancaran peningkatan populasi dan produktivitas peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Indikator lainnya, yaitu Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV dan Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang ditargetkan sebesar 2 persen setiap tahunnya.

Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular juga sangat penting dalam menjaga keseimbangan populasi dan produktivitas peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan target seperti yang ditampilkan pada tabel diatas.

BAB VI
PENUTUP

6.1 Catatan Penting

Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 yang mengacu pada RPJMD tahun 2025-2029. Selain itu, acuan utama dalam penyusunan Renja Tahun 2027 adalah Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2025-2029.

Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sangat ditentukan oleh peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing. Di samping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumber daya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan.

6.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2027 merupakan perencanaan tahunan yang bersifat operasional dan mempunyai fungsi penting dan strategis untuk menjembatani antara perencanaan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD dan implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang tertuang dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Dalam rangka menjaga kesinambungan dan menjamin terlaksananya program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pencapaian tujuan, sasaran dan target Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta pencapaian tujuan serta sasaran pembangunan daerah, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab dan berkewajiban untuk melaksanakan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2027 sesuai tugas dan kewenangannya;
2. Menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah yakni RPJMD dan RKPD dengan dokumen perencanaan PD yakni Renstra dan Renja;
3. Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2027 menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2027;

4. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2027 yang dilaksanakan secara triwulanan.

6.3 Rencana Tindak Lanjut

Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2027 yang telah ditetapkan akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 untuk kemudian dituangkan ke dalam DPA. Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2027, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFNI